



Judul : Ajukan Lagi Dana Aspirasi 11 Triliun: DPR Nggak Kapok Dihujat - DPR Boleh Ngawasin, Tapi Tak Boleh Cawe-cawe
Tanggal : Sabtu, 17 September 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-9

AJUKAN LAGI DANA ASPIRASI 11 TRILIUN DPR Nggak Kapok Dihujat

DPR seolah nggak pernah kapok dihujat masyarakat. Setelah usulan dana aspirasinya ditolak pada 2015 lalu, kini hal serupa kembali disodorkan para wakil rakyat.

, Wacana itu muncul kembali usai pertemuan pimpinan DPR dengan Menkeu Sri Mulyani, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, 29 Agustus lalu.

Ketua DPR Ade Komarudin menyebut ada enam kesimpulan dalam pertemuan. Salah satunya

terkait program pembangunan di dapil anggota DPR, atau yang lebih dikenal dengan nama dana aspirasi.

“Kami mengharapkan pemerintah mengakomodasi usulan anggota DPR, terutama berkaitan program pembangunan di daerah pemilihan sesuai janji dalam setiap anggota DPR yang dilantik,” tutur Akom, begitu ketua DPR akrab disapa.

Bak gayung bersambut, dua hari kemudian, Komisi XI langsung

◆ **BERSAMBUNG KE HAL 9**

DPR Boleh Ngawasin, Tapi Tak Boleh Cawe-cawe

DPR Nggak Kapok
... DARI HALAMAN 1

meminta Sri Mulyani Indarwati mengkomunikasikan soal ini kepada jajaran pemerintah.

Namun, usulan ini ditolak Sri Mulyani. Menurutnya, hal ini sudah keluar dari ruang lingkup Undang-undang (UU) MD3 yang disepakati beberapa tahun lalu.

Nah, kemarin, wacana dana aspirasi itu kembali bergulir. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan bahwa penggunaan dana ini merupakan hasil dari aspirasi masyarakat ketika anggota DPR meres ke dapil masing-masing.

"Sebenarnya itu sudah ada keputusan di paripurna, apa yang disebut sebagai aspirasi dari masyarakat yang diperjuangkan oleh anggota DPR. Jadi wajar kalau kita datang meres membawa aspirasi dari masyarakat untuk prioritas program," ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

"Tapi kita nggak terima uangnya. Yang menjalankan tetap pemerintahan,

dananya yang mengelola juga pemerintahan dan normatif seperti Musrenbang. Anggota DPR mengusulkan saja pada platform tertentu di daerahnya yang menjadi prioritas," lanjutnya.

Menurutnya, program tersebut bisa terbebas dari korupsi jika proses pemberiannya tepat. Mekanisme yang dimaksud, yakni aspirasi yang dikumpulkan oleh anggota DPR, didiskusikan dengan Bappenas dan Musrenbang. Dengan demikian, anggota DPR tidak memegang sendiri duit tersebut.

"Kalau dipelajari memang wajar. Kalau permintaan masyarakat tentu ada prosedur. Bukan fiktif dan jadi praktik koruptif juga. DPR wajib memperjuangkan aspirasi daerahnya," pungkasnya.

Komentar senada disampaikan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman. Dia menjelaskan, dana aspirasi dibutuhkan sebagai pertanggungjawaban para anggota DPR di dapil masing-masing.

"Urusan dapil, urusan mereka yang tanggung jawab (anggota DPR). Dana

yang diturunkan apapun kan harus dipertanggung jawabkan. DPR hanya sebatas mengusulkan," ucap Rambe di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dalam penggunaan dana aspirasi, Rambe mengajak pemerintah di daerah serta masyarakat juga turut mengawasi pelaksanaannya agar transparan. Dia juga menjamin tidak ada praktik korupsi. "DPR boleh ngawasin. DPR kan aspirasi dari dapil. Tapi enggak boleh DPR ikut cawe-cawe disitu, saya enggak setuju. Siapapun yang memeriksa silakan. Daerah, provinsi, pusat, masyarakat silakan," jelasnya.

Sebelumnya, pada pembahasan RAPBN 2015, Banggar DPR menganggarkan setiap anggota Dewan mendapat jatah proyek senilai Rp 20 miliar untuk dapilnya. Totalnya seluruh anggota DPR mencapai Rp 11,2 triliun. Meski sudah disetujui di rapat paripurna, rencana ini gagal dieksekusi. Penyebabnya, Presiden Jokowi menolaknya menyusul penolakan dari masyarakat luas.

Terpisah, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (For-

mappi) Lucius Karus mengatakan, DPR tak tahu malu lagi dengan meminta kembali dana aspirasi. "Padahal rakyat konsisten menolak itu. DPR sudah ngga kapok dihujat namanya," ujar Lucius kepada Rakyat Merdeka.

Lucius menduga, desakan DPR ini terjadi karena ada 'kebutuhan' jelang Pemilu 2019. Para politisi perlu melakukan investasi politik agar tetap dipilih saat pesta demokrasi. Uang itu, katanya, akan diberikan kepada daerah dan diklaim berasal dari anggota Dewan. Padahal, itu uang negara.

"Ini tuntutan daerah pemilihan, memang politisi dirasa perlu menunjukkan kepada daerahnya kalau dia sudah melakukan sesuatu. Kebutuhan real ini seakan menunjukkan kalau DPR tidak punya rasa malu lagi," geramnya.

Untuk itu, Lucius menyarankan agar pemerintah kembali bertindak tegas untuk menolak usulan ini. Jangan sampai, terjadi kisah legislator harus dimeja hijaukan karena dugaan korupsi dana aspirasi. "Ini harus ditolak," pungkasnya. ■ BSH